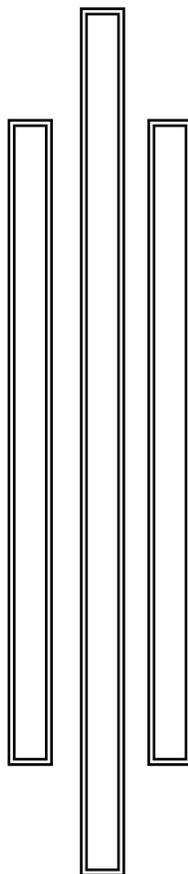


**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2014**



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 13 TAHUN 2014**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sigi Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan sarana pelayanan kesehatan dan mengatur sumber-sumber pendapatan dibidang pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas belum menampung objek retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sigi.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi.
6. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sigi yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan di bidang kesehatan.
9. Rumah Sakit adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap, rawat darurat dan rawat jalan yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang, terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, cedera dan melahirkan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah unit kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi yang memberikan pelayanan kesehatan dasar secara merata dengan mengutamakan upaya peningkatan derajat kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan rehabilitasi penderita, yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu.
11. Tindakan Medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan, tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya.
12. Pelayanan Medik adalah Pelayanan terhadap penderita yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
13. Pelayanan Penunjang Medik adalah Pelayanan untuk menunjang, menegakkan diagnosis dan terapi.
14. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Konsultasi adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
16. Rawat jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit atau Puskesmas dan jajarannya.
17. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita baik di rumah sakit maupun Puskesmas perawatan dengan cara diinapkan untuk keperluan pelayanan medik berupa pemeriksaan, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya di Ruang Rawat Inap.
18. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah pelayanan terhadap pasien yang memerlukan penanganan kedaruratan.
19. Pelayanan One Day Care adalah pelayanan terhadap pasien yang ditangani di IGD dan membutuhkan perawatan rawat inap kurang dari 24 jam.
20. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
21. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
27. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, RSUD, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis jasa sarana, jenis pelayanan kesehatan dan jangka waktu yang digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan, jangka waktu pelayanan dan kelas perawatan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan jasa.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dihitung dengan mengalihkan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD yang didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/ surat yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau obyek retribusinya mengalami kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (5) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- 1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pukesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 19);
 - 2. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sigi (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 13);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Dalam hal RSUD telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah berlaku tarif berdasarkan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 15 September 2014

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 18 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


DIDI BAKRAN, SH., M.Si
Pembina

Nip. 19700502 200012 1 004

**NOREG 24 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (11/2014)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan memberikan paradigma baru dalam perwujudan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sigi, dimana efektifitas dan efesiensi pelayanan kesehatan merupakan indikator utama yang sangat menunjang dalam melanjutkan pembangunan daerah menuju terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera dalam kerangka terwujudnya Kabupaten Sigi yang terdepan.

Bahwa sehubungan dengan terbentuknya Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Kabupaten Sigi, maka perlu mencabut Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas karena dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas belum menampung semua objek retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit.

Implementasi kebijakan menuju sasaran pembangunan daerah yang terarah dan terukur melalui pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sigi sangat penting untuk dilaksanakan dengan tujuan dapat memberikan keseimbangan lingkungan dan juga mewujudkan kondisi kesehatan masyarakat yang baik serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sigi diharapkan dapat memberikan manfaat yang berlipat ganda terhadap pembangunan di Kabupaten Sigi, selain dapat meningkatkan PAD Kabupaten Sigi juga sebagai wujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara adil dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Sigi.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 81

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KET.
I	RAWAT JALAN:		
	- Rawat Jalan	Rp. 10.000	
	- Pengujian Kesehatan	Rp. 10.000	
	- Pemeriksaan spesialis	Rp. 15.000	
	- Pemeriksaan Calon Haji/pelacakan	Rp. 40.000	
	- Konsultasi Dokter Umum	Rp. 15.000	
	- Konsultasi Dokter Gigi	Rp. 15.000	
II	RAWAT INAP/PASIEN/Hari		
	- Dewasa/ Anak /Bayi	Rp. 15.000	
	- Bayi Lahir	Rp. 10.000	
	- Visite Dokter	Rp. 15.000	
	- Jasa Perawat	Rp. 10.000	
	- Persalinan Normal Oleh Dokter	Rp. 200.000	
	- Persalinan Normal Oleh Bidan	Rp. 150.000	
	- Persalinan Dengan Penyulit	Rp. 250.000	
	- Perawatan Persalinan Normal Paket 3 Hari Rawat	Rp. 150.000	
	- Perawatan Bayi Pada Inkubator Per Hari	Rp. 15.000	
III	RAWAT KUNJUNGAN SETIAP KUNJUNGAN PER/ km	15.000/km	
IV	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN		
	- Hecting < dari 5	Rp. 15.000	
	- Hecting > dari 5 per jahitan	Rp. 3.000	
	- Tanpa Jahitan	Rp. 10.000	
V	TINDAKAN MEDIK		
	A. Tindakan Medik Ringan		
	1. Tindik Daun Telinga	Rp. 10.000	
	2. Sunat / Sirkumsisi Pria	Rp. 75.000	
	3. Ekstraksi Herdeolum	Rp. 15.000	
	4. Ekstraksi Kuku	Rp. 15.000	
	5. Insisi Abses	Rp. 15.000	
	6. KB Suntik	Rp. 15.000	
	7. Pemasangan Implant dan IUD	Rp. 50.000	
	8. Pencabutan Implant dan IUD	Rp. 45.000	
	9. Pencabutan implant dan IUD dengan penyulit	Rp. 65.000	
	10. Ekstraksi benda asing di telinga, hidung, dan mata	Rp. 25.000	
	11. Manual plasenta	Rp. 50.000	
	12. Perawatan trauma kepala ringan	Rp. 15.000	
	13. Perawatan Luka Bakar	Rp. 25.000	
	14. Pemasangan Spalk pada Fraktur Ekstraksi	Rp. 20.000	
	15. Insisi herdeulum		
	16. Pemasangan Kateter	Rp. 15.000	
	17. Pencabutan Kateter	Rp. 25.000	

	18. Pemasangan Infuse 19. Pemasangan Naso Gastric Tube 20. Nebulaizer	Rp. 25.000 Rp. 25.000 Rp. 25.000 Rp. 25.000	
	B. Tindakan Medik Sedang 1. Curetase 2. Vakum Ekstraksi 3. Pemasangan Gipsona dan Fraktur Tertutup Ekstramitaso 4. Debrideman Pada Fraktur terbuka 5. Vena Secti 6. Eksterpasi Lipoma Atheroma dan Traumatic Cysta 7. Reporasi Tendon 8. Pleural Punctie 9. Pubic punctie	Rp. 75.000 Rp. 100.000 Rp. 80.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 40.000	
	C. Tindakan Medik Gigi 1. Ekstrasi Gigi Tetap Tanpa Komplikasi 2. Ekstrasi Gigi Tetap dengan Komplikasi 3. Ekstrasi Gigi Susu Tanpa Injeksi 4. Ekstrasi Gigi Susu Dengan Injeksi 5. Tambal Sementara 6. Tambal Permanen Gigi Tetap Dengan Amalgam 7. Tambal Permanen Gigi Tetap Dengan Glass Ionomer 8. Tambal Permanen Gigi Tetap Dengan Sinar 9. Tambal Permanen Gigi Susu Dengan Amalgam 10. Tambal Permanen Gigi Susu Dengan Glass Ionomer 11. Scalling Rahang Atas/Rahang Bawah 12. Insisi Abses 13. Protheza per elemen 14. Reposisi Bukasi Mambulae Tanpa Tindakan Bedah	Rp. 30.000 Rp. 50.000 Rp. 20.000 Rp. 25.000 Rp. 15.000 Rp. 25.000 Rp. 50.000 Rp. 120.000 Rp. 15.000 Rp. 25.000 Rp. 100.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 60.000	
	D. Penunjang diagnostik : a. Pemeriksaan Laboratorium 1. Darah Rutin per Jenis 2. Urine Rutin perjenis 3. Specimen tinja 4. Specimen sputum BTA/TBC 5. Darah Malaria 6. Darah Filariasis 7. Gonorrhoe 8. Jamur 9. Mycobacterium 10. Golongan Darah 11. Tes Kehamilan 12. Tes IVA	Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 25.000	
	b. Radiologi : 1. USG 2. EKG 3. Refraksiometer	Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 25.000	

	4. Doopler c. Oxygen per jam	Rp. 20.000 Rp. 20.000	
	E. Pengurusan Jenazah a. Perawatan Jenazah di luar obat b. Pengawetan Jenazah c. Kamar Jenazah	Rp. 100.000 Rp. 300.000 Rp. 50.000	
	F. Visum et repertum a. Pemeriksaan Bedah mayat b. Minilaparotomi c. Pemeriksaan Luar (ermasuk pemeriksaan kebidanan dan gynaecologi)	Rp. 250.000 Rp. 150.000 Rp. 25.000	
	G. Pengawasan Kualitas Air a. Bakteriologis per sampel b. Kimia lengkap per parameter	Rp. 100.000 Rp. 50.000	
	H. Pemakaian Mobil Jenazah a. Ambulans/Jenazah per/Km b. Tarif minimal	Rp. 100.000 Rp. 100.000	5 Km 100.000 > 5 Km, 1 Km + 15.000

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	2	3	4	5
1. RAWAT JALAN				
A	Pemeriksaan			
	a. Konsultasi Dokter Spesialis	Rp 25,000	Rp 50,000	Rp 75,000
	b. Konsultasi Dokter Umum : TTV, Anamnese	Rp 25,000	Rp 30,000	Rp 55,000
	c. Konsultasi Dokter Gigi	Rp 25,000	Rp 30,000	Rp 55,000
	d. Konsultasi Gizi	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 40,000
B	Tindakan Polik THT			
	a. Telinga			
	- Spooling telinga / ekstraksi cerumen	Rp 15,000	Rp 25,000	Rp 40,000
	- Ekstraksi corpus alienum telinga/ ekstraksi polip	Rp 15,000	Rp 30,000	Rp 45,000
	- Toilet + tampon burowi	Rp 15,000	Rp 20,000	Rp 35,000
	- Parasentese	Rp 25,000	Rp 50,000	Rp 75,000
	b. Hidung			
	- Lidocain/ephedrin nasal spray	Rp 15,000	Rp 25,000	Rp 40,000
	- Kaustik Konka	Rp 15,000	Rp 30,000	Rp 45,000
	- Kaustik + tampon zalf	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
	- Ekstraksi corpus alienum	Rp 15,000	Rp 35,000	Rp 50,000
	c. Tenggorokan			
	- Laringoskopi Indirec	Rp 15,000	Rp 25,000	Rp 40,000
	- Kaustik faring	Rp 15,000	Rp 25,000	Rp 40,000
	- Ekstraksi corpus alienum faring	Rp 15,000	Rp 35,000	Rp 50,000
	- Audiometri	Rp 20,000	Rp 35,000	Rp 55,000
C	Tindakan Polik Syaraf			
	a. Funduscopy	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 30,000
	b. Injeksi Lokal P/C	Rp 15,000	Rp 20,000	Rp 35,000
	c. Injeksi Lokal K/P	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 40,000
	d. Lumbal Pungsi	Rp 35,000	Rp 75,000	Rp 110,000
	e. EEG/Brain Mapping	Rp 150,000	Rp 100,000	Rp 250,000
	f. Respirasi Test	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 80,000
D	Tindakan Polik Mata			
	a. Refraksi (Isihara Test)	Rp 5,000	Rp 15,000	Rp 20,000
	b. Ganti verban	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 20,000

	c. Tonometri	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 20,000
	d. Funduscopy	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 20,000
	e. Epilasi	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
	f. Irigasi	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 100,000
	g. Eksisi	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 150,000
	h. Insisi	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 150,000
	i. Absisi Corpus Alienum	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 150,000
E	Tindakan Polik Penyakit Dalam			
	a. EKG	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 80,000
	b. Rectal Touche	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 40,000
	c. Injeksi Intraartikuler	Rp 40,000	Rp 80,000	Rp 120,000
F	Tindakan Polik Kulit Kelamin			
	a. Biopsi ringan & anastesi lokal	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 150,000
	b. Eksisi ringan & anastesi lokal	Rp 75,000	Rp 100,000	Rp 175,000
	c. Kauterisasi	Rp 125,000	Rp 250,000	Rp 375,000
	d. Kerokan Kulit	Rp 10,000	Rp 20,000	Rp 30,000
	e. Debridemen luka ringan	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 20,000
	f. Prick test	Rp 30,000	Rp 125,000	Rp 155,000
G	Tindakan Polik Bedah			
	a. Necritomi/Excisi	Rp 15,000	Rp 20,000	Rp 35,000
	b. Incisi kecil	Rp 15,000	Rp 20,000	Rp 35,000
	c. Excisi / Heacting	Rp 15,000	Rp 20,000	Rp 35,000
	d. Ganti Verban	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 20,000
	e. Dilatasi Vimosis	Rp 15,000	Rp 25,000	Rp 40,000
	f. Dilatasi Anus	Rp 15,000	Rp 25,000	Rp 40,000
	g. Extractie Corpus Alienum	Rp 20,000	Rp 35,000	Rp 55,000
	h. Extractie kuku	Rp 20,000	Rp 35,000	Rp 55,000
	i. Catherisasi	Rp 20,000	Rp 35,000	Rp 55,000
	j. Lavament	Rp 20,000	Rp 35,000	Rp 55,000
	k. Buka Gips	Rp 15,000	Rp 20,000	Rp 35,000
	l. Vena Secti	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 150,000
	m. Exterpasi	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 150,000
	n. Circumsisi	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 150,000
	o. Aff Catheter	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 15,000
	p. Cruis Incisi	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 40,000
H	Tindakan Polik Kebidanan dan Kandungan			
	a. KB			
	- Pasang IUD	Rp 30,000	Rp 75,000	Rp 105,000
	- Aff IUD	Rp 30,000	Rp 75,000	Rp 105,000
	- Aff IUD dengan Penyulit	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 150,000
	- Pasang Spiral / Implant	Rp 100,000	Rp 100,000	Rp 200,000
	- Aff Spiral tanpa penyulit	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 80,000
	- Aff Spiral dengan penyulit	Rp 50,000	Rp 50,000	Rp 100,000
	- Kontrol IUD	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 20,000

	- Pelayanan Suntik KB	Rp 10,000	Rp 20,000	Rp 30,000
	- Pelayanan KB (Pil + Kondom)	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 15,000
	b. KIA			
	- Pemeriksaan Luar (Kebidanan dan Gynekologi)	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
	- Pemeriksaan Khusus (Vaginal Touchez)	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 30,000
	- Ganti Verban	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 15,000
	- Aff heacting/Heacting	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 15,000
	- PAP Smear (diluar biaya pengiriman)	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
	- Imunisasi bayi	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
I	Tindakan Polik Gigi dan Mulut			
	a. Sederhana/Kecil			
	- Ekstraksi gigi susu	Rp 10,000	Rp 20,000	Rp 30,000
	- Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi	Rp 10,000	Rp 20,000	Rp 30,000
	- Tambalan sementara	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
	- Rotasi obat perawatan saraf gigi	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
	- Pulp-caping	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
	b. Sedang			
	- Ekstraksi tanpa penyulit	Rp 15,000	Rp 20,000	Rp 35,000
	- Ekstraksi dengan penyulit	Rp 15,000	Rp 35,000	Rp 50,000
	- Tambalan tetap amalgam	Rp 15,000	Rp 20,000	Rp 35,000
	b. Sedang			
	- Trefanasi pulpa	Rp 10,000	Rp 25,000	Rp 35,000
	- Perawatan Indodemik	Rp 10,000	Rp 25,000	Rp 35,000
	- Scelling per-rahang	Rp 15,000	Rp 35,000	Rp 50,000
	- Curetage per gigi	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
	c. Besar			
	- Odontektomy	Rp 50,000	Rp 200,000	Rp 250,000
	- Insisi Intra Oral	Rp 10,000	Rp 25,000	Rp 35,000
	- Insisi Ekstra Oral	Rp 15,000	Rp 35,000	Rp 50,000
	- Gingivektomy	Rp 50,000	Rp 200,000	Rp 250,000
	- Upperkulektomy	Rp 15,000	Rp 35,000	Rp 250,000
	- Alveolektomy peregio	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 75,000
	- Frenektomi	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 75,000
	- Enukelease	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 75,000
	- Ekripsi mucocell	Rp 30,000	Rp 60,000	Rp 90,000
	- Tambahan Sinar LC	Rp 30,000	Rp 70,000	Rp 100,000
	- Fiksasi Fraktur rahang sederhana/kecil	Rp 40,000	Rp 70,000	Rp 110,000
	- Splinting/Wire	Rp 50,000	Rp 170,000	Rp 220,000
	d. Tindakan Rehabilitasi			
	- Partial denture protesa gigi pertama	Rp 45,000	Rp 85,000	Rp 130,000
	- Partial denture protesa gigi berikutnya	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 80,000
	- Partial denture protesa dengan hot Curing	Rp 40,000	Rp 85,000	Rp 125,000
	- Partial denture protesa dengan self Curing	Rp 40,000	Rp 80,000	Rp 120,000

	- Full denture	Rp 300,000	Rp 550,000	Rp 850,000
	- Mahkota jaket crown per gigi	Rp 50,000	Rp 150,000	Rp 200,000
	- Bridge per unit	Rp 70,000	Rp 230,000	Rp 300,000
	- Perawatan orthodonti lepasan	Rp 700,000	Rp 700,000	Rp 1,400,000
	- Per rahang	Rp 300,000	Rp 550,000	Rp 850,000
2	RAWAT INAP			
A	Jenis Pelayanan			
	1. Rawat Inap			
	- Kelas III	Rp 25,000	Rp 20,000	Rp 45,000
	- Kelas II	Rp 40,000	Rp 25,000	Rp 65,000
	- Kelas I	Rp 80,000	Rp 60,000	Rp 140,000
	- Vip Biasa	Rp 100,000	Rp 75,000	Rp 175,000
	- Vip Utama	Rp 150,000	Rp 100,000	Rp 250,000
	- HCU	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 160,000
	- ICU	Rp 100,000	Rp 75,000	Rp 175,000
	- NICU / PICU	Rp 100,000	Rp 75,000	Rp 175,000
B	Tindakan Kebidanan			
	a. Partus Normal			
	- Kelas III	Rp 125,000	Rp 200,000	Rp 325,000
	- Kelas II	Rp 150,000	Rp 225,000	Rp 375,000
	- Kelas I	Rp 175,000	Rp 250,000	Rp 425,000
	- VIP Biasa	Rp 200,000	Rp 275,000	Rp 475,000
	- VIP Utama	Rp 225,000	Rp 300,000	Rp 525,000
	b. Persalinan dengan tindakan pervaginam			
	- Kelas III	Rp 250,000	Rp 275,000	Rp 525,000
	- Kelas II	Rp 300,000	Rp 375,000	Rp 675,000
	- Kelas I	Rp 350,000	Rp 475,000	Rp 825,000
	- VIP Biasa	Rp 400,000	Rp 575,000	Rp 975,000
	- VIP Utama	Rp 450,000	Rp 675,000	Rp 1,125,000
3	IGD			
A	Konsul Dokter Spesialis	Rp 30,000	Rp 70,000	Rp 100,000
B	Konsul Dokter Jaga	Rp 25,000	Rp 40,000	Rp 65,000
C	Tindakan Darurat			
	a. Spooling Lambung	Rp 25,000	Rp 50,000	Rp 75,000
	b. Cruris Insisi	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 30,000
	c. Debridement Luka	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 20,000
	d. Heacting kurang dari 5	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
	e. Heacting 5 - 10	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 30,000
	f. Heacting 11 - 15	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 40,000
	g. Heacting lebih dari 15	Rp 30,000	Rp 25,000	Rp 55,000
	h. Pasang infus (diluar harga abbocath & cairan)	Rp 25,000	Rp 10,000	Rp 35,000
	i. Pasang Gips	Rp 40,000	Rp 75,000	Rp 115,000
	j. Reposisi/Fiksasi	Rp 40,000	Rp 75,000	Rp 115,000

	k. Reposisi Tendon	Rp 40,000	Rp 75,000	Rp 115,000
	l. Pungsi vesika urinaria	Rp 40,000	Rp 75,000	Rp 115,000
	j. Pasang kateter	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 40,000
	k. Resusitasi	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
	l. Pemasangan spalk untuk bayi / anak	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 30,000
	m. Pemasangan spalk untuk dewasa	Rp 40,000	Rp 25,000	Rp 65,000
	n. Skin Test	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 20,000
	o. Pasang NGT	Rp 40,000	Rp 50,000	Rp 80,000
	p. Observasi	Rp 15,000	Rp 20,000	Rp 35,000
4	ONE DAY CARE	Rp 40,000	Rp 25,000	Rp 65,000
1	PELAYANAN MEDIK			
A	Jenis Tindakan Medis Non Operatif			
	1. Sederhana / Kecil			
	- Kelas III	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 20,000
	- Kelas II	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 30,000
	- Kelas I	Rp 20,000	Rp 25,000	Rp 45,000
	- Vip Biasa	Rp 25,000	Rp 35,000	Rp 60,000
	- Vip Utama	Rp 25,000	Rp 35,000	Rp 60,000
	2. Sedang			
	- Kelas III	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 30,000
	- Kelas II	Rp 30,000	Rp 35,000	Rp 65,000
	- Kelas I	Rp 40,000	Rp 50,000	Rp 90,000
	- Vip Biasa	Rp 50,000	Rp 60,000	Rp 110,000
	- Vip Utama	Rp 55,000	Rp 65,000	Rp 120,000
	3. Besar			
	- Kelas III	Rp 20,000	Rp 25,000	Rp 45,000
	- Kelas II	Rp 45,000	Rp 65,000	Rp 110,000
	- Kelas I	Rp 55,000	Rp 80,000	Rp 135,000
	- Vip Biasa	Rp 70,000	Rp 90,000	Rp 160,000
	- Vip Utama	Rp 75,000	Rp 95,000	Rp 170,000
	4. Pelayanan Anastesi di luar tindakan Operatif			
	- Kelas III	Rp 35,000	Rp 65,000	Rp 100,000
	- Kelas II	Rp 50,000	Rp 185,000	Rp 235,000
	- Kelas I	Rp 80,000	Rp 230,000	Rp 310,000
	- Vip Biasa	Rp 120,000	Rp 340,000	Rp 460,000
	- Vip Utama	Rp 155,000	Rp 455,000	Rp 610,000
B	Tindakan Medis Operatif			
	1. Sederhana / Kecil			
	- Kelas III	Rp 175,000	Rp 325,000	Rp 500,000
	- Kelas II	Rp 262,500	Rp 487,500	Rp 750,000
	- Kelas I	Rp 350,000	Rp 650,000	Rp 1,000,000
	- Vip Biasa	Rp 437,000	Rp 713,500	Rp 1,150,500
	- Vip Utama	Rp 525,000	Rp 975,000	Rp 1,500,000

	2. Sedang			
	- Kelas III	Rp 437,500	Rp 812,500	Rp 1,250,000
	- Kelas II	Rp 525,000	Rp 975,000	Rp 1,500,000
	- Kelas I	Rp 700,000	Rp 1,300,000	Rp 2,000,000
	- Vip Biasa	Rp 875,000	Rp 1,625,000	Rp 2,500,000
	- Vip Utama	Rp 1,050,000	Rp 2,895,000	Rp 3,945,000
	3. Besar			
	- Kelas III	Rp 612,500	Rp 1,137,500	Rp 1,750,000
	- Kelas II	Rp 875,000	Rp 1,375,000	Rp 2,250,000
	- Kelas I	Rp 963,000	Rp 1,787,000	Rp 2,750,000
	- Vip Biasa	Rp 1,137,000	Rp 2,113,000	Rp 3,250,000
	- Vip Utama	Rp 1,313,000	Rp 2,437,000	Rp 3,750,000
	4. Pelayanan Anastesi di luar tindakan Operatif			
	- Kelas III	Rp 875,000	Rp 1,625,000	Rp 2,500,000
	- Kelas II	Rp 1,050,000	Rp 1,950,000	Rp 3,000,000
	- Kelas I	Rp 1,225,000	Rp 2,275,000	Rp 3,500,000
	- Vip Biasa	Rp 1,400,000	Rp 2,600,000	Rp 4,000,000
	- Vip Utama	Rp 1,575,000	Rp 2,925,000	Rp 4,500,000
2	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK			
A.	Laboratorium			
	a. Hematologi Sederhana			
	- Leukosit	Rp 5,500	Rp 2,500	Rp 8,000
	- Eritrosit	Rp 5,500	Rp 2,500	Rp 8,000
	- Trombosit	Rp 5,500	Rp 2,500	Rp 8,000
	- Hematokrit	Rp 5,500	Rp 2,500	Rp 8,000
	- Laju Endap Darah	Rp 5,500	Rp 2,500	Rp 8,000
	- Hitung Jenis Leukosit	Rp 5,500	Rp 2,500	Rp 8,000
	- CT/BT	Rp 9,000	Rp 2,500	Rp 11,500
	b. Hematologi Sedang			
	- Golongan Darah	Rp 14,000	Rp 2,500	Rp 16,500
	- Evaluasi darah Tepi	Rp 30,000	Rp 10,000	Rp 40,000
	c. Hematologi Canggih			
	- Hemoglobin (alat canggih)	Rp 25,000	Rp 2,500	Rp 27,500
	- Faeses	Rp 15,000	Rp 5,000	Rp 20,000
	d. Urinalisa			
	- Urine Lengkap	Rp 29,000	Rp 5,000	Rp 34,000
	- Plano Test	Rp 25,000	Rp 5,000	Rp 30,000
	- Esbach	Rp 15,750	Rp 5,250	Rp 21,000
	- Protein Kuantitatif	Rp 18,000	Rp 6,000	Rp 24,000
	e. Kimi Darah			
	- Glukosa	Rp 20,000	Rp 5,000	Rp 25,000
	- Kolesterol Total	Rp 25,000	Rp 5,000	Rp 30,000
	- Kolesterol LDL	Rp 25,000	Rp 5,000	Rp 30,000
	- Kolesterol HDL	Rp 25,000	Rp 5,000	Rp 30,000

	- Trigliserida	Rp 35,000	Rp 5,000	Rp 40,000
	- Uric Acid	Rp 20,000	Rp 5,000	Rp 25,000
	- Kreatinine	Rp 20,000	Rp 5,000	Rp 25,000
	- Ureum	Rp 20,000	Rp 5,000	Rp 25,000
	- SGOT	Rp 20,000	Rp 5,000	Rp 25,000
	- SGPT	Rp 20,000	Rp 5,000	Rp 25,000
	- Bilirubin (3)	Rp 20,000	Rp 5,000	Rp 25,000
	- Albumin	Rp 25,000	Rp 2,500	Rp 27,500
	- Globumin	Rp 25,000	Rp 2,500	Rp 27,500
	- Protein Total	Rp 25,000	Rp 2,500	Rp 27,500
	- Calsium	Rp 25,000	Rp 6,000	Rp 31,000
	- CK	Rp 50,000	Rp 20,000	Rp 70,000
	- CK-MB	Rp 75,000	Rp 25,000	Rp 100,000
	- Elektrolit (Paket)	Rp 100,000	Rp 30,000	Rp 130,000
	- Analisis Gas Darah (paket)	Rp 150,000	Rp 50,000	Rp 200,000
	f. Imunologi / Serologi			
	- Tes Kehamilan	Rp 20,000	Rp 8,000	Rp 28,000
	- VDRL	Rp 30,000	Rp 8,000	Rp 38,000
	- Widal	Rp 30,000	Rp 8,000	Rp 38,000
	- ASTO	Rp 30,000	Rp 8,000	Rp 38,000
	- RF (Faktor Rheumatoid)	Rp 30,000	Rp 8,000	Rp 38,000
	- CPR Kualitatif	Rp 30,000	Rp 8,000	Rp 38,000
	- HBsAg	Rp 50,000	Rp 20,000	Rp 70,000
	- Anti HBs (Kualitatif)	Rp 60,000	Rp 20,000	Rp 80,000
	- Anti HBs (Kuantitatif)	Rp 90,000	Rp 30,000	Rp 120,000
	g. Mikrobiologi Klinik			
	- Pewarnaan Gram	Rp 10,000	Rp 5,000	Rp 15,000
	- Malaria	Rp 10,000	Rp 5,000	Rp 15,000
	- Malaria Rapid Test	Rp 50,000	Rp 15,000	Rp 65,000
	- TB Rapid Test	Rp 90,000	Rp 30,000	Rp 120,000
B	Radiodiagnostik			
	a. Foto Kepala AP+ Lateral	Rp 82,500	Rp 30,000	Rp 112,500
	b. Cervical Foto AP+ Lateral	Rp 82,500	Rp 30,000	Rp 112,500
	c. Columna Vertebralis AP+ Lateral	Rp 82,500	Rp 82,500	Rp 165,000
	d. Torax	Rp 47,500	Rp 25,000	Rp 72,500
	e. Foto Polos Abdomen	Rp 47,500	Rp 25,000	Rp 72,500
	f. Pelvis	Rp 47,500	Rp 25,000	Rp 72,500
	g. Ekstremitas atas AP+ lateral	Rp 50,000	Rp 25,000	Rp 75,000
	h. Femur AP+ latera	Rp 80,000	Rp 30,000	Rp 110,000
	i. Ekstermitas bawah+ lateral	Rp 47,500	Rp 25,000	Rp 72,500
	j. Abdomen dengan kontras (3 posisi)	Rp 130,000	Rp 30,000	Rp 160,000
	k. Gigi Periapical foto	Rp 35,000	Rp 20,000	Rp 55,000
C	Elektromedik			
	a. Sederhana / Kecil	Rp 11,500	Rp 19,500	Rp 31,000
	b. Sedang	Rp 40,000	Rp 35,000	Rp 75,000

	c. Besar	Rp 85,000	Rp 90,000	Rp 175,000
	d. Canggih	Rp 14,000	Rp 110,000	Rp 124,000
D	Tindakan Rehabilitasi Medik			
	a. Pemeriksaan Umum	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 10,000
	b. Rom Tes	Rp 5,000	Rp 3,000	Rp 8,000
	c. IR	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 10,000
	d. Exc. Therapi	Rp 9,000	Rp 6,000	Rp 15,000
	e. Manual Therapi	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 10,000
	f. Senam Hamil	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 10,000
	g. Senam Nifas	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 10,000
	h. Senam Bayi	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 10,000
	i. SWD	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 20,000
	j. MWD	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 20,000
	k. Ultra Sound	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000
	l. Interferensi	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000
	m. Tens	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000
	n. Traksi	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000
E	Farmasi			
	Harga Jual Obat = Harga beli + 40%	22%	18%	40%
F	General Check Up			
	a. Sederhana	Rp 40,000	Rp 25,000	Rp 65,000
	b. Sedang (Termasuk Narkoba)	Rp 150,000	Rp 100,000	Rp 250,000
	c. Canggih	Rp 350,000	Rp 150,000	Rp 500,000
G	Oksigen			
	Pemakaian Oksigen = Rp.10.000/Liter/Jam	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 10,000
5	PELAYANAN KESEHATAN NON MEDIS			
A.	Pemeriksaan			
	a. Pemeriksaan Berbadan Sehat	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 15,000
	b. Pemeriksaan Bebas Penyalagunaan NAPZA	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 15,000
B	Gizi			
	1. Konsultasi Gizi Biasa			
	- Kelas III	Rp 4,000	Rp 3,500	Rp 7,500
	- Kelas II	Rp 5,500	Rp 4,500	Rp 10,000
	- Kelas I	Rp 6,500	Rp 6,000	Rp 12,500
	- Vip Biasa	Rp 8,500	Rp 6,500	Rp 15,000
	- Vip Utama	Rp 10,000	Rp 7,500	Rp 17,500
	2. Konsultasi Gizi dengan Komplikasi			
	- Kelas III	Rp 5,000	Rp 5,000	Rp 10,000
	- Kelas II	Rp 6,500	Rp 6,000	Rp 12,500
	- Kelas I	Rp 8,000	Rp 7,000	Rp 15,000
	- Vip Biasa	Rp 9,000	Rp 8,000	Rp 17,000
	- Vip Utama	Rp 11,000	Rp 9,000	Rp 20,000
C	Pelayanan Pemulangan / Perawatan Jenazah			
	a. Ambulance / Mobil Jenazah			

	- Dalam kota (max 5 Km)	Rp 25,000	Rp 25,000	Rp 50,000
	- Lebih 5 Km, tambah tiap km	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
	b. Perawatan Jenazah			
	- Tanpa pengafanan	Rp 25,000	Rp 25,000	Rp 50,000
	- Dengan pengafanan	Rp 250,000	Rp 100,000	Rp 250,000
	c. Penyimpanan Jenazah	Rp 25,000	Rp 25,000	Rp 50,000
	d. Pengawetan	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 500,000
G	Mediko Legal			
	- Visum et Repertum (pemeriksaan luar)	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
	- Otopsi (Bedah Jenazah)	Rp 200,000	Rp 300,000	Rp 500,000

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH